

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku :

- Adonara, F. F. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Ahmadi, Miru. (2016). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers
- Anshori, Abdul Ghofur. (2013). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etik*. Yogyakarta: UII Press.
- Arba, H.M. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Budiono, Herlien. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. (2014). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Budiono, Herlien. (2015). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burns, Robert B. (2000). *Introduction to Research Methods*. London: SAGE Publication.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Jutifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media.
- Dillah, Philips dan Suratman. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Hadjon, M Phillipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Handoko, Widhi. (2014). *Kebijakan Hukum Pertanahan (Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif)*. Semarang: Thafa Medica.
- Harahap, M.Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung, Indonesia: PT. Alumni.

- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana.
- H. S., Salim. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.S., Salim. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jened, Rahmi. (2016) *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia
- Mardani. (2017). *Etika profesi Hukum*. Depok: Raja grafindo Persada.
- Pradjidikoro, Wirjono. (1981). *Pokok-Pokok Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prakoso, Abintoro. (2015). *Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofi dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Rahman, Abd dan Baso Madiung. (2017). *Politik Hukum Pertanahan*. Jakarta: Celebes media Perkasa.
- Ridwan Khairandy. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandigan (Bgaian 1)*. Yogyakarta, Indonesia: FH UII Press.
- Santoso, Urip. (2016). *Pejabat Pembuat Akta Tanah "Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta", Cet.2*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soenandar, Taryana. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Soeroso. (2010). *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono, Bambang. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Srijanti. (2007). *Etika Berwarga Negara: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi(edisi 2)*. Salemba Empat.

Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Indonesia: Intermassa.

Sumardjono, Maria S.W. (2015). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.

Simanjatak. P.N.H. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Supramono, Gatot. (2014). *Hukum Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Setiawan, Ketut Okta. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika

Tirtodiningrat, K.R.M.T. (1996). *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Jakarta, Indonesia: PT. Pembangunan.

Waskito dan Hadi Arnowo. (2017) *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Waskito dan Hadi Arnowo. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Cet.1*. Jakarta: Kencana.

Widjaja, Gunawan. (2014). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Cet. 6*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang- Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043). Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 24 September 1960.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491). Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 6 Oktober 2004.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan Tanah, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Jurnal :

Adnyani, Ni Ketut Sari. (2013). Tinjauan Yuridis Sahnya Jual-Beli Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat Dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di Kabupaten Karangasem. Jurnal Media Komunikasi FPIPS, Jilid 12, Terbitan 1.

Aprilia, Dinda Eva, Nur Anggraini Hidayatullah, Muhammad Iswan. (2021) Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Nominee Yang Diberikan Secara Lisan. Jurnal Lex Suprema, Volume III No. 2.

Astuti, Nanin koeswati. (2016). Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum. Jurnal Hukum to-ra Universitas Kristen Indonesia, Volume 2 No. 1.

Clarina Carmelia. (2018). Kepastian Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor

787/Pdt.G/2014/PN.DPS dan Nomor 328/Pdt.G/2013?PN.DPS).
Universitas Brawijaya, Skripsi.

Dantes, Komang Febrinayanti dan I.G.A.A Hadi. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 9 No. 3

Dharma, I Gede Putu Aditya, I Nyoman Darmadha, A.A Ketut Sukranatha. (2020). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah Di Kabupaten Gianyar Oleh Orang Asing. Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.

Dewitasari, Yulia, Putu Tuni Cakabawa L. (2020). Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian. Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.

Gandasari, Bunga. (2016). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Dalam Hal Penguasaan Dan Pemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Hetharie, Yosia. (2019). Perjanjian nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sasi 25, no 1: 27-36.

Hartono, Wahyudi. (2022). Kepastian Hukum Jual Beli Tanah Dengan Kepemilikan Berdasarkan Perjanjian Nominee. Universitas Hasanuddin, Volume 30 No. 1. Wirawan.

Hanapiah, Yogi, Sigit prihanto, Sri Endah Wahyuningsih. (2018). Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akya Perjanjian Notariil. Jurnal Akta, Vol. 5 No. 1.

Julyano, M. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido, Volume 01 No. 1

Ketut Wira Adi Putra, I Gusti Agung. (2020). Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung. Jurnal Konstruksi Hukum, Universitas Warmadewa, Volume 1 No. 2.

- Kusumawati, Ni Putu Monika Ventari, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiatmaka. (2020). Keabsahan Pernajian nominee Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik Dikaji Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3 No. 2.
- Mantili, R. dan Lubis, S.A. (2017). Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Onvatkelijke Verklaard) Dalam Praktik. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 3 No. 1.
- Marlina, Heni. (2018). Pengaruh Global Terhadap Pembaharuan Hukum Nasional. Jurnal Varia Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Edisi XXXIX.
- Muhtarom, Muhammad. (2006). *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. Purba, Natalia Christine. Keabsahan Perjanjian Innominaat Dalam Bentuk nominee Agreement (Analisis Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing). PhD Thesis, Doctoral dissertation, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Nurhidayati, Siti. (2020). Akibat Hukum Pembatalan Akta Bagi Hasil (Studi Putusan Nomor 873 PK/Pdt./2017). Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Volume 1 No.2
- P. W Ayu, Denna. (2018). Akibat Hukum Bagi Para Pihak Pada Perjanjian Nominee Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Dibatalkan Oleh Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/Pdt.G/2013/PN Dps). Universitas Brawijaya, Skripsi.
- Pertiwi, Endah. (2019). Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak. Jurnal Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol.1.
- Prakoso, Wibby yuda. (2017). Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai. Jurnal Akta, Volume 4 No. 4.
- Ratnasari, Ni Made Ayu Andika. (2020). Implementasi Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Berkaitan Dengan Keabsahan Perjanjian Nominee Terhadap Hak Milik Atas Tanah Oleh WNA (Studi Kasus Di Notaris Kabupaten Jembrana). Universitas Pendidikan Ganesha, Skripsi.

Remaja, Nyoman Gede. (2014). Makna Hukum Dan Kepastian Hukum. Kertha Widya, Jurnal Hukum Volume 2 No. 1.

Sancaya, I Wayan Werasmana. (2013). Kekuatan Mengikat Perjanjian nominee Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah. Jurnal Magister Hukum Udayana 2, no. 3.

Sangalang, Amgasussari Anugrahni. (2012). Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum Dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Thesis.

Saputri, Andina Damayanti. (2015). Perjanjian Nominee Dalam Berkedudukan Di Indonesia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sholikhah, Entin. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktik Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. Jurnal Akta Vol. 4 No.1.

Wicaksono, Lucky Suryo. (2016) Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 23 No. 1.

Internet :

Harian Kabar Kumparan. 2021. "Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Warga Negara". Tersedia Pada <https://kumparan.com/kabar-harian/pemenuhan-hak-dan-pelaksanaan-kewajiban-sebagai-warga-negara-1wFoMc0K9pz/2> (Diakses pada Tanggal 30 Juli 2022)

Suara.com. 2019. "Survei 86 Persen Orang Indonesia Lebih Suka Traveling di Dalam Negeri" . Tersedia Pada <https://www.suara.com/lifestyle/2019/06/25/154621/survei-86-persen-orang-indonesia-lebih-suka-traveling-di-dalam-negeri/> (Diakses pada Tanggal 30 Juli 2022)

Indonesia News Time. 2020. "Orang Bali Cuma Di Manfaatkan Investor Asing Jani nominee" . Tersedia pada <https://bali.idntimes.com/news/bali/ayu-afria-ulita-ermalia/orang-bali-cuma-dimanfaatkan-investor-asing-jadi-nominee?page=all/> (Diakses pada Tanggal 30 Juli 2022)

Ananda. 2021. “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. Tersedia pada <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> (Diakses pada tanggal 15 Desember 2022)

Glosarium. 2014. “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. Tersedia Pada <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> (Diakses pada tanggal 15 Desember 2022)

Betari, Niken. 2022. “5 Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli Mulai Dari Notonegoro Hingga Curzon” Tersedia pada <https://bobo.grid.id/read/083405226/5-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli-mulai-dari-notonegoro-hingga-curzon?page=all/> (Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2022)

Elnizar, Norman Edwin. 2020. “Siapa Yang Paling Berpeluang Untung Dari Perjanjian Nominee”. Tersedia Pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-yang-berpeluang-paling-untung-dari-perjanjian-nominee-lt5e513c47eb594/> (Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2022)

Faisal, Achmad. 2022. “Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Nominee Di Indonesia”. Tersedia Pada <http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev/article/view/36/> (Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2022)

Hukum Online. 2020. Hukumnya Praktik Pinjam Nama (Nominee) Untuk Menghindari Pajak”. Tersedia Pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-praktik-pinjam-nama-i-nominee-i-untuk-menghindari-pajak-lt5fb659347bf32/> (Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2022)

Inez. 2022. “Apa Itu Nominee? Hukum Perjanjian Pinjam Nama dan Praktiknya Di Indonesia”. Tersedia Pada <https://jateng.tribunnews.com/2022/05/19/apa-itu-nominee-hukum-perjanjian-pinjam-nama-dan-praktiknya-di-indonesia/> (Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2022)

Yurismuda. 2022. “Perjanjian Nominee dan hak Atas Tanah Oleh WNA”. Tersedia Pada <https://yurismuda.com/perjanjian-nominee-hak-atas-tanah-oleh-wna/> (Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2022)